



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Pengadilan Agama Bangkalan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Bangkalan berkedudukan di Kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, dengan alamat Jl. Soekarno Hatta No. 49, Bangkalan Telp (031) 3095582 Fax. (031) 3061482.

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Pertama berdiri Pengadilan Agama Bangkalan bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30

tahun. Kemudian pada Bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116, dan sekarang menempati kantor baru di Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan 69116, Telp./Fax (031)3095582/(031) 3061482, E-mail : pabangkalan@gmail.com.

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 281 desa. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bangkalan. 18 kecamatan tersebut yang menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Kabupaten Bangkalan. Berikut ini merupakan kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, yaitu:

1. Kecamatan Arosbaya (18 Desa: desa Arosbaya, Desa Balung, Desa Batonaong, Desa Berbeluk, Desa Cendangah, Desa Dlemer, Desa Glagah, Desa Karang Duwak, Desa Karang Pao, Desa Lajing, Desa Makam Agung, Desa Mangkon, Desa Ombul, Desa Pandan Lanjang, Desa Plakaran, Desa Tambengan, Desa Tengket)
2. Kecamatan Bangkalan (13 Desa: Desa Bancaran, Desa Pejagan, Desa Sabiyan, Desa Gebang, Desa Demangan, Desa Pangeranan, Desa Kemayoran, Desa Mlajah, Desa Sembilangan, Desa Ujung Piring, Desa Keraton, Desa Keramat, Desa Martajasah)
3. Kecamatan Blega (19 Desa: Desa Alasraja, Desa Bates, Desa Blega, Desa Blengoloh, Desa Gigir, Desa Kajan , Desa Kampao, Desa

Karang Gayam, Desa Karang Panas, Desa Karang Nangka, Desa Karpote, Desa Lomaer, Desa Lombang Daya, Desa Lombang Laok, Desa Nyor Manes, Desa Pangeran Gedungan, Desa Panjalin, Desa Rosep)

4. Kecamatan Burneh (12 Desa: Alas Kembang, Desa Benangkah, Desa Binoh, Desa Burneh, Desa Jmbu, Desa Kapor, Desa Langkap, Desa Pngolongan, Desa Perreng, Desa Sobih, Desa Tonjung)
5. Kecamatan Galis (21 Desa: Desa Bangpendah, Desa Desa Banjar, Desa Banyubunih, Desa Blateran, Desa Daleman, Desa Galis, Desa Kajuanak, Desa Kelbung, Desa Kranggan Timur, Desa Lantek Barat, Desa Lantek Temor, Desa Longkek, Desa Paka'an Laok, Desa Paka'an Daya, Desa Paterongan, Desa Pekadan, Desa Sadah, Desa Separah, Desa Sorpa, Desa Telagah, Desa Tellok)
6. Kecamatan Geger (13 Desa: Desa Banyoneng Dajah, Desa Banyoneng Laok, Desa Batobella, Desa Campor, Desa Dabung, Desa Geger, Desa Kampak, Desa Katol barat, Desa Kombangan, Desa Kopol, Desa Lerpak, Desa Tagubang, Desa Tegerpriyah)
7. Kecamatan Kamal (10 Desa: Desa Binajuh, Desa Gili Anyar, Desa Gili Barat, Desa Gili Timur, Desa Kamal, Desa Kebun, Desa Pendabah, Desa Tajungan, Desa Tanjung Jati, Desa Tellang)
8. Kecamatan Klampis (22 Desa: Desa Banteyan, Desa Bator, Desa Bragang, Desa Buluk Agung, Desa Bulung, Desa Karang Asem, Desa Klampis Barat, Desa Klampis Timur, Desa Ko'ol, Desa Larangan

Glintong, Desa Larangan Sorjan, Desa Lergunong, Desa Manonggal, Desa Mrandung, Desa Muwarah, Desa Penyaksagan, Desa Polongan, Desa Ra'as, Desa Tenggun Daya, Desa Tobaddung, Desa Tolbuk, Desa Trogan)

9. Kecamatan Kokop (13 Desa: Desa Banda Soleh, Desa Bandang Laok, Desa Batokorong, Desa Dupok, Desa Durjan, Desa Katol Temor, Desa Kokop, Desa Gunong, Desa Mandung, Desa Mano'an, Desa Tlokoh, Desa Tramok)
10. Kecamatan Konang (13 Desa: Desa Bandung, Desa Batokaban, Desa Campor, Desa Cangkarman, Desa Durin Barat, Desa Durin Timor, Desa Galis Daya, Desa Ganteng, Desa Kanegarah, Desa Konang, Pakes, Desa Sambian, Desa Sen-asen)
11. Kecamatan Kwanyar (16 Desa: Desa Batah Barat, Desa Batah Timor, Desa Dlemer, Desa Duwek Bunter, Desa Gunong Sereng, Desa Janteh, Desa Karang Anyar, Desa Karang Gentang, Desa Ketentang, Desa Kwanyar Barat, Desa Mrombuh, Pandanan, Desa Paoran, Desa Pasanggrahan, Desa Sumur Kuning, Desa Tebul)
12. Kecamatan Labang (13 Desa: Desa Ba'engas, Desa Bringin, Desa Bunajih, Desa Jukong, Desa Kesek, Desa Labang, Desa Morkepek, Desa Pangpong, Desa Petapan, Desa Sendang Daya, Desa Sendang Laok, Desa Sukolilo Barat, Desa Sukolilo Timur)
13. Kecamatan Modung (17 Desa: Desa Alaskokon, Desa Brakas, Desa Glisgis, Desa Karanganyar, Desa Kolla, Desa Langpangpang, Desa

mangga'an, Desa Modung, Desa Neroh, Desa Paeng, Desa Pakong, Desa Pangpajung, Desa Patengteng, Desa Petereman, Desa Serabi Barat, Desa Serabi Timur, Desa Suwa'an)

14. Kecamatan Sepulu (15 Desa: Desa Bangsereh, Desa Banyior, Desa Gangseyan, Desa Gunelap, Desa Kelbung, Desa Klabetan, Desa Klapayan, Desa Labuhan, Desa Lembung, Desa Maneron, Desa Prancak, Desa Saplasmah, Desa Sepulu, Desa Tanah Gurah Barat, Desa Tanah Gurah Timur)

15. Kecamatan Socah (11 Desa: Desa Bilaporah, Desa Bhulu, Desa Dakiring, Desa Jaddih, Desa Jungannar, Desa Keleyan, Desa Parseh, Desa Ternajuh, Desa Petaonan, Desa Socah, Desa Sanggar Agung)

16. Kecamatan Tanah Merah (23 Desa: Desa Baipajung, Desa Basanah, Desa Batangan, Desa Buddan, Desa Dlambah Dajah, Desa Dlambah Laok, Desa Durnajah, Desa Jangkar, Desa Kendaban, Desa Kranggan Barat, Desa Landak, Desa Mrecah, Desa Pacentan, Desa Pandurungan, Desa Pangeleyan, Desa Patemon, Desa Petrah, Desa Pettong, Desa Poter, Desa Rongdurin, Desa Tanah Merah Dajah, Desa Tanah Merah Laok, Desa Tlomar)

17. Kecamatan Tanjungbumi (14 Desa: Desa Aeng Tabar, Desa Bandang Dajah, Desa Bannyu Sangkah, Desa Bumi Anyar, Desa Bungkeng, Desa Larang Timur, Desa Macajah, Desa Paseseh, Desa Planggiran, Desa Tagungguh, Desa Tambak Pocok, Desa Tanjung Bumi, Desa Tlaga Biru, Desa Tlangoh)

18. Kecamatan Tragah (18 Desa: Desa Alang-alang, Desa Bajeman, Desa Bancang, Desa Banyu Besih, Desa Dukotambin, Desa Jaah, Desa Jaddung, Desa Karang Leman, Desa Kemoneng, Desa Keteleng, Desa Masaran, Desa Pacangan, Desa Pamorah, Desa Pocong, Desa Soket Dajah, Desa Soket Laok, Desa Tambin, Desa Tragah)

Wilayah atau letak geografis Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. *Letak geografis*

Bujur Timur : $112^{\circ}40'06''$ - $113^{\circ}08'$

Lintang Selatan : $6^{\circ}51'39''$ - $7^{\circ}11'39''$

2. *Luas dan batas-batas wilayah*

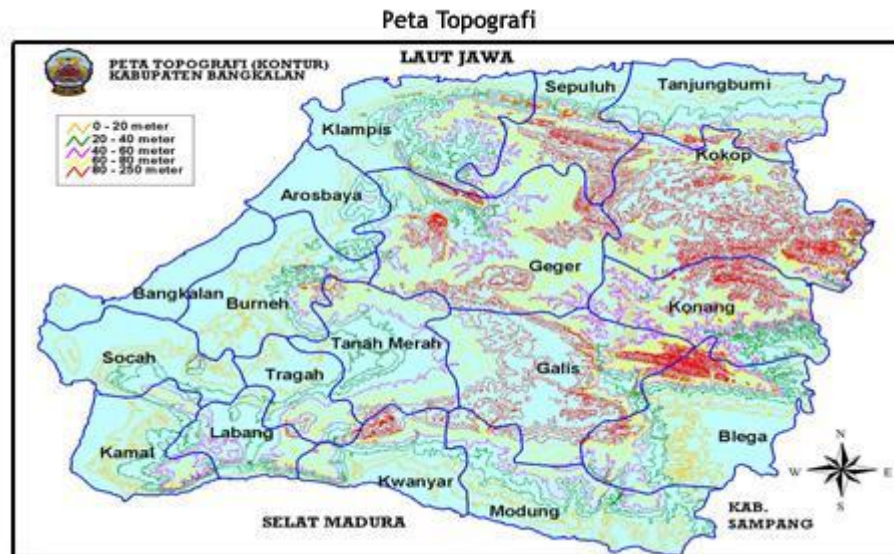
Secara administratif Kabupaten Bangkalan luas wilayahnya mencapai 1.260,14 Km² dengan 18 Kecamatan dan 8 Balai Desa dan 281 Desa. Jumlah Penduduk : 926.559 jiwa dengan kepadatan rata – rata 735/ Km². Adapun batas-batas dari Kabupaten Bangkalan adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa,

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang,

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura, dan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.



3. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 217.062 dengan rincian jumlah laki-laki 106.915.000 dan perempuan sejumlah 110.147 jiwa dan sebanyak 1.393.960 (95,89 %) jiwa beragama Islam.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ". Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

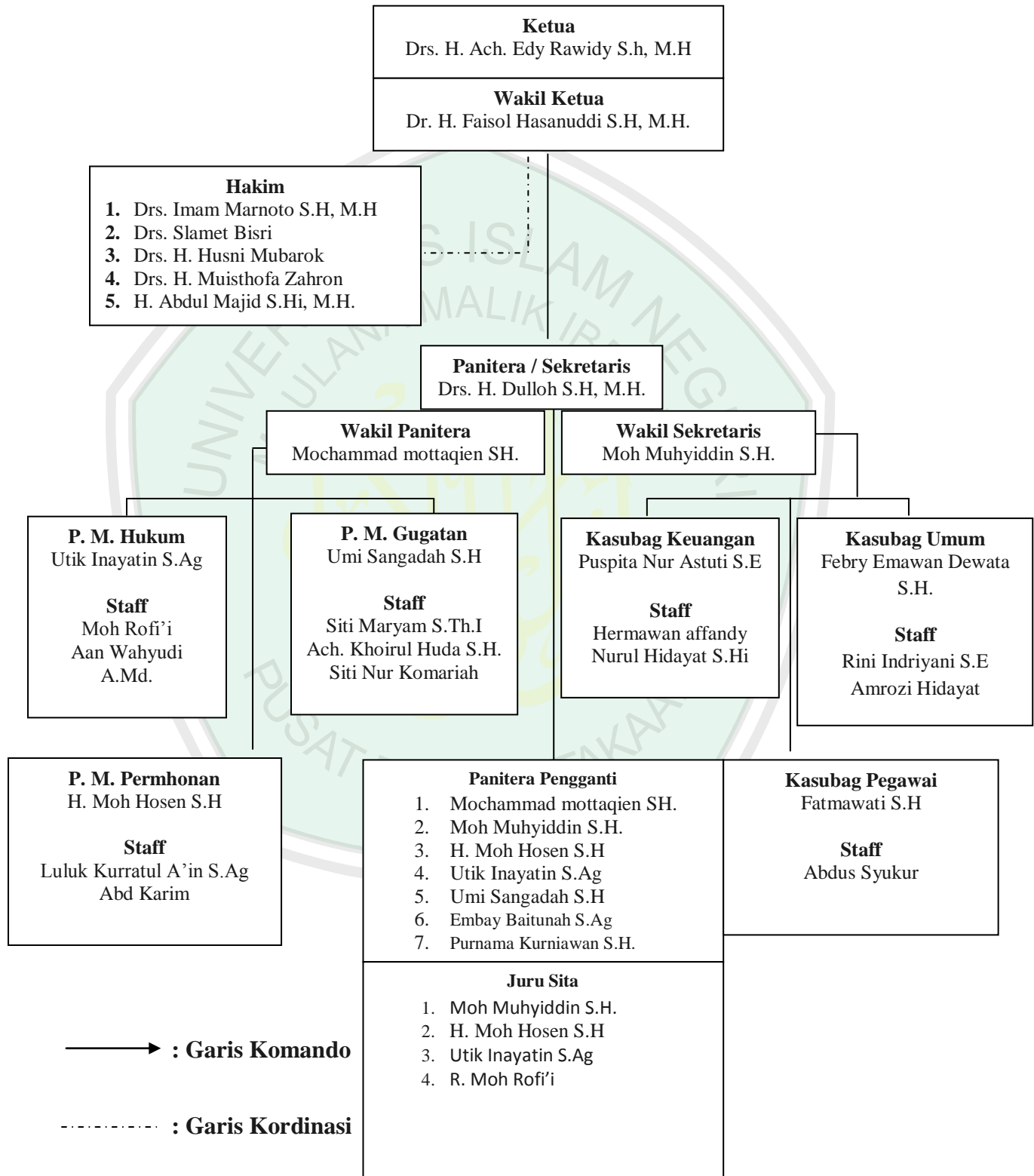
¹ Peta Topografi Kabupaten Bangkalan

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Agama Bangkalan sebagai peradilan agama tingkat pertama dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2005– 2010. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Bangkalan dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2011-2015. Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2010-2014, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2006-2010 di Pengadilan Agama Bangkalan sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

2. Struktur Organisasi



Berikut ini adalah jumlah dari seluruh hakim, Panitera, Juru Sita dan karyawan administrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan kelas I B, yaitu:

1. Jumlah Hakim : 7 orang
2. Jumlah Panitera : 7 orang
3. Jumlah Juru Sita : 4 orang
4. Jumlah Karyawan : 19 orang

3. Fasilitas Pendukung

Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang membantu memudahkan hakim, penitera, juru sita dan karywan untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain:

- Musholla
- Ruang Sidang
- Ruang Kepaniteraan
- Ruang Mediasi
- Ruang Ketua Pengadilan
- Ruang Kesekretariatan
- Ruang Tunggu
- Ruang Hakim
- Ruang Wakil Pengadilan
- Ruang Panitera/Sekertaris
- Ruang Wakil Sekretaris

P3HP	-	2	-	4	3	2	2	-	2	1	-	3	19
Lain-lain	5	5	4	6	3	10	4	1	5	8	5	5	61
Jumlah	809	527	620	578	658	504	431	547	724	732	772	510	

Berdasarkan data statistik diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara terbanyak yang masuk pertahun 2014 mulai yang teratas adalah:

1. Cerai gugat : 4.533 perkara
2. Cerai talak : 2.126 perkara
3. Isbat nikah : 518 perkara
4. Dispensasi kawin : 65 perkara
5. Lain-lain : 61 perkara
6. Wali Adhol : 21 perkara
7. P3HP : 19 perkara
8. Perwalian : 19 perkara
9. Kewarisan : 18 perkara
10. Ijin Poligami : 6 perkara
11. Harta Bersama : 5 perkara
12. Wasiat : 4 perkara
13. Penguasaan Anak : 3 perkara

14. Hibah : 2 perkara

15. Pembatalan Kawin : 1 perkara

16. Izin nikah : 1 perkara

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa perkara-perkara yang diajukan terutama perkara isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan mayoritas merupakan perkara yang bersifat prodeo. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah merupakan masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah sehingga banyak masyarakat yang mengajukan perkaranya melalui proses perkara prodeo.²

2. Pandangan Masyarakat tentang jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama

Setiap orang yang akan mengajukan perkara diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat administratif di meja I terlebih dahulu, seperti: surat gugatan atau permohonan, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku nikah suami istri atau akta nikah, menyelesaikan biaya panjar, dan lain-lain. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, baru para pihak bisa mendaftarkan perkaranya di meja II. Dalam hal ini, peneliti menemukan *Klebun* yang membantu pendaftaran administratif para pihak di meja I. Menurut Ibu Umi Sangadah selaku Pengangung Jawab di

² Ibu Utik Inayatin, *wawancara* (Bangkalan, 31 Februari 2015)

meja I menyatakan bahwa lebih dari 90% masyarakat Bangkalan ketika mendaftar dibantu oleh *Klebunnya*. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Banyak Klebun yang ikut-ikutan di Meja I. Rata-rata orang Bangkalan itu pas daftar di meja I diantar sama Klebunnya. Padahal tanpa diantar sama Klebunnya lho mereka juga bisa daftar sendiri.”*³

Hal ini sejalan dengan hasil survey wawancara kepada beberapa pihak yang melaksanakan pendaftaran bersama *Klebunnya*, yaitu:

1. Ahmad (39) dari Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah:

“kuleh de’ kainto adaftarra de’ Pengadilan. Atellakgha sareng bineh kuleh. De’ kinto’ sareng Carek ben kakak.”(saya kesini mau mendaftarkan perkara di Pengadilan. Mau bercerai dengan istri saya. Berangkat kesini bersama Sekretaris Desa dan kakak saya).⁴

2. Monep (42) dari Desa Janteh Kecamatan Kwanyar:

“kuleh atellakghe sareng bineh kuleh. Samangken pon sidang keduwe’. Ghi’ teppa’en adaftar kaissah eater sareng Klebun.” (saya mau bercerai dengan istri saya. Sekarang sudah sidang kedua. Ketika mendaftar, saya dibantu oleh Klebun).⁵

3. Saidah (38) dari Desa Konang Kecamatan Konang:

“kuleh mondhutta sorat tellak. Teppa’en adaftar kuleh eater kakak kuleh se arangkep Klebun”. (saya mau mengambil surat cerai. Ketika mendaftar, saya diantar oleh kakak saya yang juga kebetulan sebagai Klebun)⁶

4. Aminah (24) dari Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah:

³ Ibu Umi Sangadah, wawancara (Bangkalan 5 Maret2015)

⁴ Bapak Ahmad, wawancara (Bangkalan, 3 Maret2015)

⁵ Bapak Monep, wawancara (Bangkalan, 3 Maret2015)

⁶ Ibu Saidah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret2015)

“kuleh ngajuaghin isbet de’ kainto. Kuleh teppa’en adaftar lebet Klebun polannah lakeh kuleh bedeng Malaysia. Dhaddi se ngurus sedejeh ghi pak Klebun kaissah”. (saya ingin mengajukan isbat nikah. Ketika mendaftar, saya dibantu oleh Klebun. Karena suami saya sedang bekerja di Malaysia, jadi yang mengurus semuanya itu Pak Klebun)⁷

5. Hasan (45) dari Desa Kokop Kecamatan Kokop:

“kuleh ngajuaghin isbet de’ kainto. Se adaftar eater sareng pak Klebun”. (saya mau mengajukan isbat nikah. Ketika mendaftar diantar oleh Klebun).⁸

6. Dlofir (39) dari Desa Petaonan Kecamatan Socah:

“saya kesini mau mengajukan isbat nikah buat dapat buku nikah. Kebetulan saya diantar oleh pak Kades kesini”.⁹

7. Isnainiyah (43) dari Desa Lajing Kecamatan Arosbaya:

“kule de’ kinto keng ngater ale’ kuleh aisbet nikah. Teppa’en adaftar se ngurus pak carek”. (saya kesini mengantarkan adek saya mengajukan isbat nikah. Ketika mendaftar, semua dirus oleh pak SekDes).¹⁰

8. Meli (23) dari Desa Lomaer Kecamatan Blega:

“kule atellaghe ba’. Nekah sareng pak klebun ben tretan se ngater de’ kinto”. (saya mau bercerai mbak. Ini saya diantar oleh Pak Klebun dan saudara saya).¹¹

9. Risky (33) dari Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan:

“kule keng ngateraagih ale’ kule akabinnah keng omorrah ghilok cokop. Se ngurus sedejeh pak Klebun”. (saya hanya mengantarkan

⁷ Ibu Aminah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

⁸ Bapak Hasan, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

⁹ Bapak Dlofir, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹⁰ Ibu Isnainiyah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹¹ Ibu Meli, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

*adek saya saja untuk melakukan dispensasi kawin. Yang mengurus semuanya pak Klebun)*¹²

10. Rohim (38) dari Desa Jaddung Kecamatan Tragah:

*“kuleh de’ kinto’ keng ikrar talak saos. Teppa’ en adaftar eater Pak Carek”. (Saya kesini mau melakukan ikrar talak saja. Ketika mendaftar diantar oleh Pak Sekdes)*¹³

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang diwawancarai diatas ketika mendaftar dibantu oleh Klebun. Dalam hal membantu, biasanya para Klebun atau bawahan yang dipercayai oleh Klebun seperti Sekretaris Desa atau lainnya tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka merupakan saudara atau kerabat dari para pihak yang sedang mengajukan perkara tersebut. Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Sangadah berikut:

*“Biasanya Klebun yang ikut itu duduk di ruang tunggu. Tetapi ada juga yang ikut-ikutan ke Meja I bersama para pihak. Ketika ditanya apa hubungan Klebun itu dengan para pihak ada yang mengatakan dengan jujur bahwa orang tersebut Klebun, ada juga yang berdalih sebagai saudara atau kerabat dari pihak yang mendaftar. Terkadang Klebun yang ikut-ikutan ini malah yang mengambil alih proses pendaftaran. Jadi yang seharusnya mendaftar hanya ngikut dan tanda tangan saja.”*¹⁴

Ketika ditanya sampai manakah keikutsertaan para Klebun dalam membantu para pihak, Ibu Umi menyatakan:

*“Klebun yang jujur itu biasanya cuma sampe daftarin perkaranya aja. Pas udah di ruang sidang biasanya Klebun Cuma menunggu di ruang tunggu. Tapi ada juga yang sampe ikutan jadi saksi segala pas di ruang sidang.”*¹⁵

¹² Bapak Risky, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹³ Bapak Rohim, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹⁴ Ibu Umi Sangadah, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

¹⁵ Ibu Umi Sangadah, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

Dalam hal pendaftaran, sudah menjadi kebiasaan bahwasannya masyarakat yang mengajukan perkara dibantu oleh Klebun, terutama bagi masyarakat yang awam terhadap hokum dan jarak antara rumah dengan Pengadilan Agama terbilang cukup jauh. Akan tetapi, sampai sejauh mana keikutsertaan dan peran Klebun yang membantu para pihak, informan bermacam-macam jawabannya, yaitu:

1. Ahmad (39) dari Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah:

“Kule keng eater pas adaftar saos ba’. Lastareh adaftar ghi palemam. Pak Klebun sareng kuleh epareng pesse bensin sareng rokok.” (saya hanya diantar ketika mendaftar saja ba’. Setelah selesai mendaftar, ya sudah pulang. Pak Klebun saya kasih uang bensin dan rokok.)¹⁶

2. Monep (42) dari Desa Janteh Kecamatan Kwanyar

“kuleh eater pas adaftar kaissah sareng pak Klebunnah dhaddi sakseh polananah compo’en pak Klebun sareng kuleh asanding. Pak Klebun lo’ nyo’on bhejeren” (saya diantar ketika mendaftar dan pak Klebun juga jadi saksi karena rumah saya dan Pak Klebun bersebelahan. Pak Klebun juga tidak minta bayaran)¹⁷

3. Saidah (38) dari Desa Konang Kecamatan Konang

“kuleh eater pas adaftar kaissah sareng pak Klebunnah dhaddi sakseh polananah compo’en pak Klebun sareng kuleh asanding. Pak Klebun lo’ nyo’on bhejeren keng sareng tetangge kaissah epakon mareng obeng 750 ebuh ben de’ pengadilen.” (saya diantar ketika mendaftar dan pak Klebun juga jadi saksi karena rumah saya dan Pak Klebun bersebelahan. Pak Klebun juga tidak minta bayaran tapi sama tetangga saya disuruh ngasih 750 ribu setiap ke pengadilan)¹⁸

4. Aminah (24) dari Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah

¹⁶ Bapak Ahmad, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹⁷ Bapak Monep, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

¹⁸ Ibu Saidah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

“pak Klebun ngaterragin teppa'en adaftar sareng dhaddi sakseh polanah oreng seppo kuleh sareng lakeh tade' neng Madureh. Pak Klebun nyo'on ongkos 500 ebuh sareng rokok se pack bhen ka pengadilan” (pak Klebun mengantar ketika mendaftar dan untuk menjadi saksi juga. Karena orang tua saya dan suami sedang tidak di Madura. Pak Klebun minta uang 500 ribu dan 1 pack rokok setiap ke Pengadilan)¹⁹

5. Hasan (45) dari Desa Kokop Kecamatan Kokop

“Pak klebun keng ngater pas adaftar tok. Lastareh neka ghi mpon ngurus dhibi'. Pak Klebun eparenge pesse 250 ebuh sareng rokok.” (Pak Klebun hanya mengantar ketika mendaftar saja. Setelah itu, saya mengurus sendiri. Pak Klebun saya kasi uang 250 ribu dan rokok).²⁰

6. Dlofir (39) dari Desa Petaonan Kecamatan Socah

“saya dibantu Pak Klebun pas daftar sama ketika sidang, Pak Klebun jadi saksi. Pokoknya sampai proses sidangnya nanti selesai pas putusan, saya minta diantar sama Pak Klebun. Pak Klebun tidak minta bayaran tetapi saya kasi beliau rokok dan uang 150 ribu tiap mengantar ke Pengadilan”²¹

7. Isnainiyah (43) dari Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

“kuleh kabbi se ngurus Pak Klebun. Molae daftar sampek mangken pas mondhut surat putusan kaissah. Bhen de' Pengadilen majer 350 ebuh ka Pak Klebun” (semua yang ngurus pak Klebun, mulai daftar sampai nanti ketika mengambil surat putusan. Setiap ke Pengadilan bayar 350 ribu kepada Pak Klebun)²²

8. Meli (23) dari Desa Lomaer Kecamatan Blega

“kuleh eorossaghi Pak Klebun sedegeh sampe' mareh. Pak Klebun menta 250 ebuh ben ka Pengadilen. Mangken san le beres, majer 500 ebuh”. (saya diruskan Pak Klebun semuanya. Pak Klebun minta 250

¹⁹ Ibu Aminah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²⁰ Bapak Hasan, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²¹ Bapak Dlofir, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²² Ibu Isnainiyah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

*ribu setiap ke Pengadilan. Ketika semuanya sudah selesai Pak Klebun minta 500 ribu.)*²³

9. Risky (33) dari Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan

*“kuleh ken eater teppa’ en daftar saos. Selebbinah alakoh dhibi’ sareng kuleh pak Klebun ken eparengkeh padih duwe’ sag sareng rokok saos” (saya hanya diantar ketika mendaftar saja. Selebihnya saya kerjakan sendiri. Pak Klebun saya kasi padi dua sag rokok saja.)*²⁴

10. Rohim (38) dari Desa Jaddung Kecamatan Tragah

*“kuleh ken eater teppa’ en daftar saos. Selebbinah alakoh dhibi’ sareng kuleh pak Klebun ken eparengkeh rokok ben obeng 100 ebuh” (saya hanya diantar ketika mendaftar saja. Selebihnya saya kerjakan sendiri. Pak Klebun saya kasi rokok dan uang 100 ribu.)*²⁵

Senada dengan pernyataan informan yang dibantu oleh Klebun, Ibu Sangadah juga menyatakan bahwa setiap Klebun yang ikut ke Pengadilan apapun kepentingannya, pasti minta bayaran.

*“o.. iya dibayar. Pokoknya setiap ke Pengadilan apapun kepentingannya pasti dibayar. Pasti berapa bayarnya sih saya juga tidak tahu karena biasanya itu tergantung sama negosiasi antara Klebun sama orang yang mau berperkara itu. Meskipun minta bayarannya tidak selalu uang. Ada juga yang minta bayaran berupa tanaman hasil bumi kalau kebetulan warga yang minta tolong itu petani yang lagi baru panen.”*²⁶

Dari seluruh wawancara bersama informan, dapat disimpulkan bahwasannya keikutsertaan dan peran Klebun dalam hal membantu masyarakat dalam proses berperkara berbeda-beda tergantung dari permintaan dari masyarakat yang mengajukan perkara. Dalam hal membantu, setiap Klebun akan memberikan tarif yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena antara Klebun

²³ Ibu Meli, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²⁴ Bapak Risky, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²⁵ Bapak Rohim, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²⁶ Ibu Umi Sangadah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

yang satu dengan Klebun yang lain memang tidak mempunyai sebuah referensi yang bisa dijadikan patokan dalam hal tarif atau biaya ketika membantu masyarakat. Sehubungan dengan apakah Klebun menawarkan diri atau para pihak tersebut minta bantuan Klebun, semua informan menyatakan bahwa Klebun yang menawarkan. Berikut salah satu hasil wawancara dengan Ibu Isnainiyah (43) dari Desa Lajing Kecamatan Arosbaya:

“Pak Klebunnah kaissah se metabar abe’. Ghi je’rengan reng dhisah, lo’ oneng pa-apah, dhaddi le etoro’ saos napah dikannah Klebun. Ben pole dheng-kadheng orang nekah polannah se lo’oneng jelen entarra ka Pengadilan. Bedepole orang polana lo’ ghedhuwen orang se esoroah ngateraagin. Dhaddi orang neka bannya’ se nyo’on tolong sareng Klebun”. (Pak Klebunnya yang bisanya menawarkan diri. Ya.. dasarnya orang desa, tidak tahu apa-apa. Jadi ngikut saja dengan apa yang dikatakan sama Pak Klebun. Lagi pula terkadang orang out tidak tahu jalan yang mau ke Pengadilan. Ada juga yang karena tidak ada orang lagi yang disuruh buat mengantar. Jadi orang akhirnya minta tolong sama Klebun)²⁷

Dalam hal menawarkan diri ketika akan membantu, biasanya Klebun menawarkan diri ketika masyarakat meminta surat pengantar dari Balai Desa atau Balai Desa sebelum mengajukan perkara. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui alur berperkara atau masih awam terhadap hukum, maka masyarakat tersebut akan dengan senang hati menerima bantuan dari Klebun mereka. Ketika ditanya pendapat mengenai Jasa Klebun tersebut, informan berbeda-beda jawabannya:

1. Ahmad (39) dari Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah:

“ghi mon ca’epon kuleh, padeh ontongngah. Klebun ontong olle ceperan, kuleh ghi asokkor bedeh se atolong. Mon masalah obeng se namba amarge majer ka Klebun kaissah ghi anggep sedekah saos.”
(ya, kalau menurut saya, sama-sama untung. Klebun dapat ceperan,

²⁷ Ibu Isnainiyah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

*saya juga bersyukur sudah ada yang menolong. Masalah bayaran nambah kepada Klebun, saya anggap sedekah saja)*²⁸

2. Monep (42) dari Desa Janteh Kecamatan Kwanyar

*“ca’epon kuleh ghi masyarakat ontong. Je’reng Klebun nekah ekapercajeh oreng, ben lakar kodu nolong de’ masyarakatta se asossaan. Manabi klebun nyo’on bejeren, ghi wajar. Jhe’ reng nyamanah oreng nolong, masa’ ta’ eparengnga panapah, magghunnah ken rokok saos.” (menurut saya ya masyarakatnya untung. Klebun itu kan dipercaya sama masyarakat, dan memang harus menolong masyarakatnya yang sedang kesusahan. Jika Klebun minta bayaran, hal itu wajar saja. Namanya juga orang menolong. Masa’ tidak diberi apa-apa meskipun hanya rokok saja.)*²⁹

3. Saidah (38) dari Desa Konang Kecamatan Konang

*“masyarakat nekah se ontong polanah Klebunna begus ghellem atolong oreng. Apapole manabi Klebunnah ta’ menta bejeren. Jhe’ sakengngah Klebun neka nyo’on bejeren, ghi lo’ anapah ghebei kebelli rokok.” (masyarakat yang berutnung karena Klebunnya mau membantu orang lain. Seandainya Klebun itu minta bayaran, ya tidak apa-apa buat beli rokok)*³⁰

4. Aminah (24) dari Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah

*“jhe’ sakengngah kule nika oneng jelen, lake kuleh bedeh, ben lo’ kebhuruh, ghi kuleh alakoah dhibi’ ka Pengadilen. Apapole Klebunnah nika nyo’on bejeren maloloh bhen de’ Pengadilen.(andaikan saya tahu jalan, suami saya ada, dan saya tidak sedang terburu-buru, akan saya kerjakan sendiri ke Pengadilan. Apalagi jika Klebunnya minta bayaran setiap ke Pengadilan)*³¹

5. Hasan (45) dari Desa Kokop Kecamatan Kokop

²⁸ Bapak Ahmad, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

²⁹ Bapak Monep, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³⁰ Ibu Saidah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³¹ Ibu Aminah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

“Pak klebun nekah becce’ pon ghellem ngateraghi kuleh de’ kainto. Kule angrasa ontong etolong Klebun. Sala kateppa’an kuleh nekah tamasok oreng se cokop, dhaddi majer Klebun lo’ pateh dhaddi pekkeran” (Pak Klebun itu baik sudah mau menolong saya kesini. Saya merasa beruntung sudah ditolong oleh Pak Klebun. Kebetulan juga saya termasuk orang yang berkecukupan jadi tidak terlalu memikirkan pengeluaran untuk bayaran Klebun).³²

6. Dlofir (39) dari Desa Petaonan Kecamatan Socah

“ saya rasa Klebun membantu masyarakat di Pengadilan juga merupakan tugasnya sebagai orang yang terpilih sebagai Kepala Desa. Meskipun pada akhirnya nanti Klebun minta bayaran, tetapi sebagai orang yang sudah ditolong harus tahu diri juga sebagai ungkapan terimakasih memberi sesuatu kepada Klebun. Tetapi dilain pihak, Klebunnya juga harus tahu diri ketika meminta bayaran kepada masyarakatnya melihat mata pencaharian dan penghasilan masyarakat disini tidak semuanya tinggi”³³

7. Isnainiyah (43) dari Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

“kuleh kabbi se ngurus Pak Klebun. Molae daftar sampek mangken pas mondhut sorat putusan kaissah. Mon kuleh ghi ontong polanah lo’ usa wet-ruwet” (semua yang ngurus pak Klebun, mulai daftar sampai nanti ketika mengambil surat putusan. Saya merasa beruntung karena saya tidak perlu repot)³⁴

8. Meli (23) dari Desa Lomaer Kecamatan Blega

“kuleh ghi angrasa rogi ba’ jhe’ sakengnga oneng dhari ade’”. (merasa rugi andaikan saya tahu dari awal.)³⁵

9. Risky (33) dari Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan

“kuleh ghi sanyatanah rogi. Keng manabih eker pekker pole ghi Klebun nekah lakar nakalan narek obeng ka masyarakat se nyo’on tolong. Engghi mon oreng nekah soghi. Mon teppa’ de’ oreng se melarat ghi Klebunnah se kleroh epadeddhi Klebun polanah lo’

³² Bapak Hasan, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³³ Bapak Dlofir, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³⁴ Ibu Isnainiyah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³⁵ Ibu Meli, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

neser ka masyarakatta”. (saya sih sebenarnya rugi, tapi jika dipikir ulang ya memang Klebunnya memang berbuat curang karena meminta bayaran kepada masyarakat yang meminta tolong. Iya kalau masyarakatnya termasuk masyarakat yang kaya, jika tidak maka Klebunnya sudah salah dalam pemilihan Klebun karena tidak memikirkan masyarakatnya)³⁶

10. Rohim (38) dari Desa Jaddung Kecamatan Tragah

“pak Klebun kuleh becce’. Ghellem nolong orang. Lo’ keng kuleh saos se toman etolong. Mon keng de’ Pengadilen nekah Pak Kleun le biasah. Lakar manabih de’ Pengadilen, Klebun nekah eparengheh ombhel. Manabih kuleh ghi eparengheh rokok sareng obeng 100 ebuh”. (Pak Klebun itu orangnya baik. Mau menolong orang, bukan hanya saya saja yang pernah ditolong. Kalau hanya ke Pengadilan Pak Klebun itu sudah biasa. Kalau Pak Klebun ke Pengadilan itu memang diberi upah. Kalau saya, saya kasih rokok dan uang 100 ribu)³⁷

Kesimpulan dari wawancara para informan di atas adalah masyarakat yang dibantu oleh Klebun beberapa merasa dirugikan, ada juga yang merasa diuntungkan. Masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan Klebun tersebut membantu mereka dengan imbalan yang mana tarif dari imbalan tersebut melebihi tarif atau biaya untuk proses berperkara. Padahal dalam hal tingkat penghasilan tidak semua masyarakat memiliki penghasilan yang terbilang tinggi, melihat kebanyakan dari masyarakat di Bangkalan memiliki mata pencaharian sebagai petani, beberapa sebagai peternak dan pedagang. Bagi masyarakat yang merasa diuntungkan, mereka beralasan bahwa masyarakat yang sudah dibantu Klebun seharusnya merasa beruntung karena dibantu oleh Klebun. Sebagaimana diketahui bahwasannya Klebun sebagai perangkat Desa memiliki kegiatan yang padat

³⁶ Bapak Risky, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

³⁷ Bapak Rohim, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

sehingga patut merasa beruntung terlebih masyarakat yang tidak mengetahui hokum. Jadi bagi masyarakat yang merasa beruntung tersebut tidaklah merasa rugi manakala Klebun meminta bayaran sebagai balas jasa. Tetapi lain halnya dengan para pihak yang dibantu oleh Klebun, Ibu Sangadah berbeda pendapat mengenai rugi atau untungnya bagi para pihak tersebut. Ibu Umi berpendapat bahwa masyarakat sebenarnya dirugikan oleh Klebun yang meminta bayaran tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“saya sih merasa kasihan kepada masyarakat yang dibantu sama Klebun. Kalau dapet Klebun yang baik, mungkin Klebunnya Cuma minta uang bensin sama rokok saja. Bahkan kalau Klebunnya baik banget, Klebunnya tidak minta apa-apa. Tapi beda lagi kalau orang itu dapet Klebun yang kurang baik. Klebunnya minta bayaran yang kalau dijumlah hampir sama dengan jumlah biaya panjar, bahkan lebih. Terkadang ada orang yang sampai jual ternaknya Cuma untuk berperkara di Pengadilan. Padahal biaya panjar jika prosesnya lancar tidak sampai lebih dari 1 juta”³⁸

Dari semua pernyataan di atas, terdapat perbedaan pendapat bahwa Klebun yang membantu masyarakat di Pengadilan Agama merasa diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Bagi masyarakat yang merasa diuntungkan, adalah masyarakat yang tidak begitu banyak ketika Klebun diberi bayaran karena membantu para pihak tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan yaitu karena Klebun ketika diberi bayaran tidak sebagaimana mestinya atau melebihi jumlah biaya panjar jika dijumlahkan seluruhnya. Hal ini sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat merupakan masyarakat dengan keadaan harta yang mencukupi. Karena tidak adanya nilai bayaran yang

³⁸ Ibu Umi Sangadah, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

disamakan atau dijadikan ukuran standart dalam setiap perkara yang diajukan, menjadikan bayaran kepada Klebun yang membantu menjadi tidak sama rata.

Selain melakukan wawancara kepada para pihak yang sudah dibantu oleh Klebun, Peneliti juga melakukan wawancara kepada para Klebun, baik yang kebetulan sedang berada di Pengadilan Agama maupun yang sedang berada di kantor Balai Desa setempat. Berikut ini merupakan pernyataan dari Klebun-klebun tersebut mengenai jasa mereka dalam membantu proses perkara:

1. Klebun dari desa Kokop kecamatan Kokop (Bapak Suwanto)

“kuleh de’kinto epentaeh tolong ngater tetangge polanah ca’epon lo’ oneng jelen sareng lo’ andi’ kendaraan. Ghi biasanah epareng rokok sareng pesse bensin. Masyarakat nekah laku biasa menta tolong sareng Balai Desa. Polanah manabih masayrakat ngajuaginnah kabinan otabelh tellaghen, ghi kodu alapor de’ Balai Desa.(saya kesini dimintai tolong tetangga karena katanya dia tidak tahu jalan dan tidak punya kendaraan. Biasanya dikasih rokok dan uang bensin. Masyarakat itu memang sudah biasa meminta tolong kepada Balai Desa. Karena jika masyarakat mau mengajukan kawin atau cerai, semuanya harus melapor terlebih dahulu ke Balai Desa)”³⁹

2. Klebun dari desa Lomaer Kecamatan Blega (Bapak Said)

“kuleh ken ngater saos ba’. Lastareh ngater nekah mangken ghi pakoca’en reng-orengah dhibi’. Ghi manabih kuleh senyatana lo’ ebhejer lo’ anapah. Tapeh biayasanah laku orang nekah mangken apareng rokok sareng obeng bensin. Reng-oreng nekah laku kodu alapor de’ Balai Desa ma’le mon bedeh pa-napah mangken Balai Desa bisa abentoh”. (saya hanya mengantar saja mbak. Setelah mengantar ini ya terserah orangnya sendiri. Kalau saya sih sebenarnya tidak dibayar juga tidak apa-apa. Tapi biasanya memang lumrahnya dibayar rokok dan uang bensin. Orang-orang

³⁹ Bapak Suwanto, wawancara (Bangkalan, 3 Maret 2015)

*itu memang wajib lapor ke Balai Desa biar tahu nanti kalau ada ap-apa Balai Desa bisa membantu)*⁴⁰

3. Klebun dari desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah (Bapak Muhammad)

*“masyarakat nikah wajib alapor ka Balai Desa sopajeh administrasi neng Balai Desa nekah tartib. Manabih bedeh se akabin otabel atellakghe ma’le ecatet neng Balai Desa. Ma’le mangken manabih lake’ bine’ apolong, bedeh bhukteh jhe’ lastareh akabin ben lo’ dhaddi fitnah.” (masyarakat itu wajib melapor ke Balai Desa agar administrasi di Balai Desa menjadi tertib. Jika ada yang menikah atau bercerai supaya dicatatkan di Balai Desa. Supaya nanti ketika ada seorang laki-laki dan perempuan bersama, ada bukti yang kuat bahwa mereka sudah menikah agar tidak jadi fitnah)*⁴¹

4. Klebun dari desa Patemon Kecamatan Tanah Merah (Bapak Adnan)

“ ghi, masyarakat nikah oneng dhibi’ manabih adaftarra napa’ah beih nikah nyo’on surat pengantar neng KaKepala Desa. Biyanah ghebei akte lahir anak, akte nikah, sorat kabin, sorat tellak, ben bennya’ pole. Tapeh se umum oreng nyo’on surat pengantar kaissah ghi ghebei kaissah. Masyarakat kaintoh sadar jhe’ nyo’on surat neng Balai Desa nekah pon dhaddi syarat neng administrasi ben sebagai pemberitahuan neng Balai Desa. Dhaddi ghi mpon biyasa oreng nyo’on surat de’ kaintoh. Menabih Klebun se abhentoh masayarakat nikah ghi tergantung sareng kaperloannah. Menabih Balai Desa bisa abentoh, ghi ebentoh. Terlepas nekah eparenghe bhejeren napah bunten tergantung oreng se nyo’on tolong kaissah. Tape ghi biyanah lo’ mentah ghi eprenghe langsung sareng masyarakat nikah.” (ya, masyarakat itu sudah tau sendiri jika ingin mendaftar sesuatu apapun memang minta surat pengantar di Balai Desa. Biasanya digunakan untuk membuat akta lahir anak, akta nikah, surat nikah, surat cerai, dan lain-lain. Tapi umumnya ya buat surat-surat itu tadi. Masyarakat

⁴⁰ Bapak Said, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

⁴¹ Bapak Muhammad, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

disini sadar bahwasannya meminta surat ke Balai Desa sudah menjadi syarat administrasi sekaligus sebagai pemberitahuan di Balai Desa. Jadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat minta surat kesini. Kalau Klebun yang membantu masyarakat itu ya tergantung keperluannya. Kalau Balai Desa bisa membantu ya bakal dibantu. Terlepas nantinya akan diberi bayaran atau tidak. Tetapi masyarakat biasanya memang memberi bayaran kepada yang membantu tadi)⁴²

5. Klebun dari Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan (Bapak Ahmadi)

“masyarakat bedeh se oneng, bedeh se lo’ oneng jhe’ wajib nyo’on sorat de’ Balai Desa manabih adaftarah de’ Pengadilen. Biyasanah mambhun belein. Lakar kabennya’an oreng neng kaintoh nekah ta’ oneng caranah ka Pengadilen. Dhaddi pon biyasa etolong sareng Klebunnah. Klebun nekah ghi mangken eparenggeh ombel sareng oreng se etolong magghunah keng rokok saos. Tapeh kabennya’an eparenggeh obeng. Ghi, cem-macem. Bedeh se satos ebuh, bedeh se diattasseh. Tergantung.” (masyarakat ada yang tau, ada juga yang tidak tau bahwasannya wajib minta surat ke Balai Desa jika ingin mendaftar ke Pengadilan. Memang banyak orang disini yang tidak tau cara berperkara di Pengadilan. Jadi sudah biasa jika orang itu ditolong sama Klebunnya. Klebun itu nantinya ya dikasi bayaran sama orang yang ditolong tadi. Ya.. macem-macem. Ada yang seratus ribu, ada juga yang lebih dari itu. tergantung)⁴³

6. Klebun desa Pacangan Kecamatan Tragah (Bapak Murni)

“sorat pengantar ghi? Neng kaintoh seggut oreng nyo’on sorat nikah. Ana-bernah hajatta, tapeh laku ghebei masampornah administrasi. Contoh epon manabih adaftarah de’ pengadilen, se atellkghe, se akabinnah, se abegieh berisen, ben bannya’ pole. Kabennya’an oreng nikah paham jhe’ wajib nyo’on. Paleng oreng nekah se ta’ paham mangken san neng pengadilennah. Kan manabih administrasi nikah bisa ngoladhin neng brosur. Mangken

⁴² Bapak Adnan, wawancara (Bangkalan, 5 Maret 2015)

⁴³ Bapak Ahmadi, wawancara (Bangkalan, 6 Maret 2015)

san neng pengadilen biasanah bingung, mangkanah nyo'on ater de' Klebu. Ghi, mangken sareng Klebun kan eater, ghi mangken eparengkeh bejeren jhugen.” (surat pengantar ya? Disini memang sering orang minta surat itu. Macam-macam keperkuannya, tapi memang untuk melengkapi administrasi. Contohnya ketika mau mendaftar ke Pengadilan, yang ingin bercerai lah, yang ingin isbat lah, yang ingin mengurus pembagian warisan lah, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka itu paham bahwa wajib meminta surat itu. Paling mereka tidak pahamnya ketika di Pengadilan. Kalau masalah administrasi kan bisa lihat dibrosur. Tapi pas di Pengadilan, biasanya mereka merasa kebingungan sehingga pihak Balai Desa membantu mereka. ya, nanti kan Klebunnya mengantarkan mereka, ya nanti mereka juga akan membayar sama Klebun)⁴⁴

7. Klebun desa Martajasah Kecamatan Bangkalan (Bapak Agus)

“manabih masyarakat neng kaintoh, lakar awam sareng hokum. Dhaddi menabih terro ka Pengadilen, lakar nyo'on tolong de' oreng se ekapercajeh contohna ghi Klebun. Ghi mangken sareng Klebun etolongeh se bisanah. Manabih bisa sampe' tuntas ghi, epamareh. Manabih bunten, ghi sa-bisanah Klebun. Dhengkadheng manabih Klebunnah gheduwen hajat laen, Klebun nekah nyo'on tolong carekghe. Biyananah mangken ghi oparengkeh ombhel sareng oreng se nyo'on tolong. Ghi sekadereh saos. “ (kalau masyarakat disini memang awam terhadap hokum. Jadi kalau mau ke Pengadilan memang minta tolong sama orang yang dipercaya contohnya Klebun. Ya... nanti sama Klebunnya biar dibantu sebisanya. Kalau bisa membantu sampai tuntas, ya bakal dibantu sampai tuntas. Kalau tidak bisa ya nanti sebisanya. Terkadang kalau Klebunnya punya acara yang lain, nanti minta tolong sama Sekdes. Biasanya nanti ya dibayar sama orang yang dimintai tolong.dibayar sekedarnya)⁴⁵

8. Klebun dari Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan (Bapak Aji)

“masyarakat kaintoh bedeh se oneng, bedeh se ta' oneng. Manabih se oneng, ghi langsung de' Pengdilen dhibi'. Manabih se ta'

⁴⁴ Bapak Murni, wawancara (Bangkalan, 6 Maret2015)

⁴⁵ Bapak Agus, wawancara (Bangkalan, 6 Maret2015)

oneng, ghi menta tolong ka oreng se oneng. Tapeh lo' koduh de' Klebun. Se koduh nekah coma alapor de' Balai Desa saos. Dhaddhi nyo'on tolong de' sera'ah saos nekah kengeng. Biyasanah lakar mangken eparengen ombel.” (masyarakat disini ada yang tau, ada juga yang tidak tau. Kalau masyarakat yang tau ya langsung ke Pengadilan sendiri. Kalau yang tidak tau ya minta tolong sama orang yang tau. Tapi tidak harus minta tolong sama Klebun. Yang harus itu melapor ke Balai Desanya saja. Ya.. biasanya nanti memang diberi bayaran)⁴⁶

9. Klebun dari Desa Dlmabah Dajah Kecamatan Tanah Merah (Bapak Sa'ed)

“Klebun kan lakar kodhuh abentoh masyarakatta manabih kaossa'an. Ghi lo' koduh pas kenning cobeh, manabih bedeh moremoh ghi manabih sanggup abentoh, ghi koduh abento. Magghunnah lo' ebejer, je'reng lakar la kelakonnah. Ken mon oreng kaintoh lakar ampo menta ater mon de' pengadilen. Ghi mangken ebejer.” (Klebun memang harus membantu masyarakatnya ketika sedang kesusahan. Tidak mesti harus ketika susah, tetapi meskipun sedang ada hajat kalau sanggup membantu ya harus membantu. Meskipun tanpa dibayar, kan memang sudah kewajibannya membantu. Tapi kalau masyarakat disini memang sering minta antar kalau mau ke Pengadilan. Ya.. nanti dapat bayaran)⁴⁷

10. Klebun dari Desa Dlmabah Laok Kecamatan Tanah Merah (Bapak Imam)

“masyarakat neng kintoh jarang se bedeh parloh de' pengadilen. Bedeh oreng nekah ghi' annonnah menta tolong ater ka Pengadilen. Biasanah polanah ta' oneng jelen ben lo' gheduwen montor. Ghi mangken eparenge bejeren.” (masyarakat disini jarang yang punya keperluan ke Pengadilan. Ada beberapa waktu yang lalu, seorang warga minta tolong diantarkan ke Pengadilan.

⁴⁶ Bapak Aji, wawancara (Bangkalan, 7 Maret 2015)

⁴⁷ Bapak Sa'ed, wawancara (Bangkalan, 8 Maret 2015)

*Basanya karena tidak tau rute jalan atau tidak punya kendaraan yang mau kesana. Ya.. nanti dapat bayaran)*⁴⁸

Kesimpulan dari wawancara dengan Klebun diatas adalah bahwa rata-rata masyarakat di Bangkalan meminta bantuan Klebun ketika akan berperkara. Pada dasarnya Klebun dimintai tolong karena merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakatnya. Yang wajib adalah melapor ke Balai Desa agar Balai Desa mempunyai data tentang masyarakatnya, seperti masyarakat yang akan mengajukan perkara dispensasi nikah atau perkara cerai, sehingga administrasi di Balai Desa menjadi tertib dan teratur. Selain itu, alasan lainnya kenapa masyarakat wajib melapor ke Balai Desa adalah agar masyarakat jika terdapat kesulitan, pihak Balai Desa bisa membantu sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.

Masyarakat yang sangat bergantung kepada *Klebun* pada dasarnya memiliki alasan. Karena dalam konteks ini, tidak sembarang orang dapat mencalonkan diri sebagai klebun. Mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai klebun, selain harus memenuhi prosedur normatif administratif seperti harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), juga harus memiliki persyaratan kultural. Klebun merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura. Klebun oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai broker budaya di samping kyai dan blater oleh karena kedudukannya yang sangat berpengaruh dan kuat tersebut. Terkadang di beberapa desa klebun menjadi lebih kuat dari blater dan kyai karena yang menjadi klebun merupakan blater itu sendiri bahkan kyai juga. Tentunya dengan kekuatan keblaterannya dan kekeayaannya yang kemudian ditambah dengan

⁴⁸ Bapak Imam, wawancara (Bangkalan, 8 Maret 2015)

kekuasaan formal di sebuah desa maka kekuatannya pun menjadi sangat tidak diragukan. Klebun merupakan elit desa yang dalam mencapainya tidak sembarang orang bisa. Karena itu untuk meraih kedudukan sebagai klebun ada persyaratan kultural di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana kepala desa pada umumnya. Di antara persyaratan kultural itu antara lain bahwa klebun harus memiliki kekuatan personal, baik dalam konteks keilmuan atau dalam arti yang lain yaitu memiliki kapasitas diri sebagai seorang jagoan atau memiliki jiwa keblateran. Persyaratan kultural lainnya adalah ikatan kekerabatan menjadi faktor kultural yang sangat dominan. Bahkan, tidak jarang yang terjadi dalam pemilihan klebun adalah pertarungan rezim keluarga. Selain itu ikatan dan jaringan keblateran menjadi mutlak diperlukan dalam upaya menjadi klebun.

Pada dasarnya pada pasal 14 point ke-delapan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di bab IV paragraf kedua bahwasannya mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Kepala Desa atau dalam pembahasan ini disebut dengan Klebun mempunyai hak, kewajiban, dan tugas seperti diatas. Dalam hal ini mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan maksudnya adlah ketika desa yang berada di bawah pimpinannya berada dalam suatu masalah atau sengketa dan mengharuskan perwakilan dari salah seorang dari masyarakat di desa tersebut, maka Kepala Desa tersebutlah yang berhak untuk mewakili ke Pengadilan. Seandainya Kepala Desa tidak bisa hadir mewakili desa yang dipimpinnya, maka Kepala Desa diperbolehkan untuk menunjuk kuasa hokum

untuk mewakilinya. Selain itu, kewajiban dari Kepala Desa adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 15). Hal ini dapat direalisasikan dengan cara membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau mendapat musibah. Selain itu, menjaga ketertiban masyarakat secara administrative kepada Kantor Desa ketika terdapat suatu perubahan status atau lainnya seperti ketika seseorang mengajukan perkara cerai ke Pengadilan, maka wajib melapor ke Balai Desa agar tertib administrasi dalam Balai Desa.

Dalam kasus Klebun di Madura khususnya Bangkalan, yang mana Klebun membantu masyarakat ketika berperkara di Pengadilan, merupakan salah satu kewajiban dari Klebun sebagai orang terpercaya yang terpilih dari jalan demokrasi dengan cara pemilihan Klebun di desa masing-masing. Tetapi, Klebun di Bangkalan melakukan tindakan illegal yaitu meminta imbalan setelah membantu masyarakatnya yang berperkara di Pengadilan. Meskipun dari pernyataan Klebun-klebun sebagai informan diatas, masyarakat memberi imbalan kepada Klebun sebagai balas jasa atas bantuan jasa yang Klebun berikan dengan semampu mereka. Tetapi di lain pihak, beberpa informan yang telah peneliti wawancarai juga menyatakan bahwa Klebun mematok harga yang tidak menentu tiap orangnya. Ada yang sekali datang ke Pengadilan memberi bayaran sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 500.000,-. Dalam hal ini beberapa orang yang telah dibantu oleh Klebun merasa keberatan tentang tarif bayaran tersebut karena biaya beyaran Klebn melebihi biaya panjar yang wajib dibayarkan oleh para pihak ke Pengadilan. Mengingat masyarakat di Bangkalan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi selama ini, masyarakat tidak ada yang mengambil tindakan

mengingat masyarakat yang masih awam terhadap hukum, jadi budaya tersebut berlaku sampai saat ini.

Dalam Bantuan Hukum di Indonesia, orang atau lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan adalah advokat/pengacara, pokrol (pengacara praktek), fakultas hukum yang mendirikan lembaga bantuan hukum.⁴⁹ Dalam hal ini, Klebun termasuk dalam kategori Pokrol yaitu pengacara praktek. Fungsi utama dari pokrol adalah untuk membela di ruang persidangan. Walaupun pokrol ada banyak jenisnya, namun ada satu karakteristik yang sama-sama mereka miliki. Mereka lebih cenderung untuk beroperasi di kelompok-kelompok masyarakat yang terendah dalam lapisan sosial masyarakat sehingga mereka lebih dekat dengan masyarakat miskin. Apabila para advokat umumnya berasal dari kalangan elite yang strata sosialnya lebih tinggi dan menempuh pendidikan tinggi, umumnya pokrol malah berasal dari desa-desa kecil. Kebanyakan advokat menangani klien-klien besar sedangkan pokrol menangani sisanya. Semua perbedaan tersebut berimplikasi pada tarif jasa hukum yang diberikan dimana tarif imbalan jasa pokrol jauh lebih rendah dibandingkan dengan advokat. Di Madura, keberadaan advokat tidaklah banyak. Mengingat masyarakat Madura sangat mempercayai figure-figure berikut: *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, *ban Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figure-figure utama itulah kepatuhan hirarkis orang-orang Madura menampilkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.⁵⁰ Sehingga tidaklah

⁴⁹ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 252.

⁵⁰ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura...* h., 11.

mengherankan jika masyarakat Madura banyak yang lebih memilih meminta bantuan Klebun dari pada bantuan hukum lain seperti advokad atau lainnya.

3. Tanggapan pihak Pengadilan Agama Bangkalan tentang adanya jasa Klebun yang membantu proses berperkara di Pengadilan Agama

Banyaknya Klebun yang membantu masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan, tentunya memiliki dampak terhadap lembaga di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang Ketua Pengadilan Agama Bangkalan (Bapak Edi Rawdi) tuturkan:

“sebenarnya ketika Klebun itu membantu para pihak dalam berperkara tidaklah berdampak apa-apa. Apalagi dalam hal pendaftaran administratif di meja I dan II. Hanya saja yang menjadi masalah yaitu ketika si Klebun memanipulasi keadaan atau apapun yang dapat tidak semestinya. Seperti pendaftaran perkara secara prodeo. Masyarakat Madura ini tidak semuanya beruang. Jika dilihat dari mata pencahariannya yang hanya bertani atau sebagai buruh, maka bisa dikatakan ekonomi mereka merupakan kategori ekonomi menengah ke bawah. Jadi kami, Lembaga Pengadilan Agama telah mengajukan tambahan dana operasional untuk perkara prodeo. Yang awalnya hanya sebanyak 60 juta rupiah sekarang menjadi 70 juta rupiah. Pokoknya mulai tahun 2013 ditambahkan biaya prodeo itu. Tetapi hal tersebut ternyata tidak bisa mencukupi karena ketika direalisasikan kepada masyarakat, kebutuhan akan perkara prodeo semakin bertambah sehingga terdapat beberapa keluarga yang tidak mendapatkan perkara prodeo. Nah, ketika orang tersebut tidak bisa mendapatkan perkara prodeo, otomatis kan harus bayar secara regular, jadi gak gratis. Nah terkadang, perkara prodeo ini yang dijadikan keuntungan sama Klebun. Jadi Klebun itu menguruskan para pihak untuk dapat perkara secara prodeo. Tetapi disisi lain, Klebun itu minta bayaran kepada para pihak sama seperti jumlah biaya panjar jika para pihak bayar biaya panjar secara regular atau biasa. Baru sekarang timbul kerugian yang ada di Pengadilan. Kerugiannya dimana? Ya.. disitu tadi. Kita dari pihak Pengadilan sebenarnya sudah berusaha untuk membantu masyarakat agar bisa berperkara secara gratis. Tetapi malah

*Klebunnya yang nakal meminta bayaran karena sudah membantu para pihak mendapatkan hak perkara secara prodeo.*⁵¹

Dari pernyataan Bapak Edi Rawdy selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa Klebun yang membantu berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan tidak ada jasa yang gratis, karena ketidak pahaman masyarakat tentang prosedur bahwa adanya perkara secara prodeo. Dari pernyataan diatas, timbul pertanyaan baru, apakah yang menyebabkan masyarakat harus melewati Klebun ketika akan berperkara di Pengadilan? Dari pertanyaan ini, bapak Edi Rawdi menjawab:

*“sebenarnya masyarakat tidak harus lewat Klebun ketika akan berperkara di Pengadilan Agama, karena di dalam syarat-syarat pendaftaran administrasi tidak ada keharusan meminta keterangan dari Balai Desa, kecuali untuk keterangan tidak mampu agar mendapat hak berperkara secara prodeo. Kami dari pihak Pengadilan juga sudah memberi keringanan jika ingin berperkara secara gratis dan tidak harus mengumpulkan surat keterangan tidak mampu dari Balai Desa, yaitu dengan menunjukkan surat miskin atau ASKIN beserta mengumpulkan foto copyannya yang biasa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tetapi ternyata pihak Balai Desa juga tidak mau kalah. Ketika masyarakat tidak mau meminta surat keterangan dari Balai Desa, maka pihak Balai Desa akan mempersulit kita ketika kami dari pihak Pengadilan Agama ingin mengantarkan relass panggilan kepada para pihak yang tidak dapat ditembusi ketika dipanggil ke Pengadilan untuk sidang. Sehingga mau tidak mau kami dari pihak Pengadilan tidak bisa berbuat banyak ketika Klebun membantu para pihak. Meskipun kami sudah memberi tahu para pihak agar datang sendiri ke Pengadilan tanpa diantar Klebun, masyarakat juga banyak yang tidak tahu prosedur kesini, jadi mau tidak mau ya ke Klebunnya.”*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Edi selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan bahwasannya masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa Klebun ketika berperkara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya hal ini

⁵¹ Bapak Edi, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

⁵² Bapak Edi, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

tidaklah berpengaruh apa-apa ketika Klebun tujuannya hanya mengantar saja. Tetapi akan lain ceritanya ketika Klebun turun tangan dalam berperkara dan memanipulasi keadaan, seperti mengambil keuntungan dari orang-orang yang berperkara di Pengadilan dengan dalih uang tersebut digunakan untuk kepentingan proses di Pengadilan. Padahal hal tersebut belum tentu benar adanya, sebab mayoritas Klebun meminta bayaran yang melebihi jumlah biaya panjar yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini menurut Bapak Edy merugikan pihak Pengadilan karena masyarakat akan beranggapan bahwa orang yang berperkara di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak ada jalan untuk mendapatkan keadilan secara cuma-cuma atau gratis. Padahal dari pihak Pengadilan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara secara prodeo. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua pihak menggunakan hak berperkara secara prodeo dengan semestinya, seperti yang terjadi di Pengadilan Bangkalan. Beberapa Klebun melakukan manipulasi keadaan ke Pengadilan dengan memalsukan beberapa berkas dengan menunjukkan bahwa pihak yang berperkara termasuk orang yang tidak mampu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Di lain pihak, Klebun tersebut tidak mengatakan secara jujur kepada para pihak bahwasannya mereka terdaftar sebagai pihak dengan perkara secara prodeo sehingga pihak tersebut membayar tagihan biaya panjar secara penuh lewat Klebun tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa Klebun mengambil keuntungan dari masyarakat maupun dari pihak Pengadilan Agama. Tetapi tidak semua Klebun memiliki niat mengambil keuntungan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Beberapa Klebun masih

menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran serta kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Bapak Mohammad Hosen selaku Panitera Muda sekaligus Juru sita di Pengadilan Agama Bangkalan juga membenarkan pernyataan Bapak Edi tentang Klebun yang tidak mau mengantarkan relass panggilan dari Pengadilan Agama kepada para pihak dikarenakan pihak yang berperkara tersebut tidak melapor.

“pak Klebun itu tidak mau mengantar relass panggilan dari Pengadilan kalau orang yang berperkara tadi tidak melapor ke Kelurahan. Jadi kalau saya mengantarkan kepada Klebun yang seperti itu, biasanya saya harus melakukan negosiasi terlebih dahulu. Jadi disini saya menegaskan bahwa orang yang berperkara disini tidak selalu pihak pemohon atau penggugat sehingga tidak perlu melapor ke Kelurahan. Kan kalau tergugat atau termohon tidak usah melapor ke Kelurahan. Setelah itu, Klebun ada yang sadar akan tugasnya untuk mengantar ada juga yang tidak. Nah kalau yang tidak sadar ini yang rada susah karena ami sebagai juru sita harus berkeliling berputar-putar mencari sampai sekiranya bertemu. Tetapi untuk saat ini, jarang Klebun yang menolak diberi relass panggilan jadi tidak terlalu susah. Terlebih kami juru sita sudah mempunyai link Klebun tiap desa di Kabupaten ini.”⁵³

Senada dengan pernyataan Bapak Hosen diatas, Ibu Utik Inayatin selaku Panitera Pengganti sekaligus juru sita di Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat Klebun yang masih tidak mau mengantarkan relass panggilan kepada para pihak.

“Klebun itu masih ada yang tidak mau mengantarka relass panggilan. Tapi sudah berkurang jumlahnya daripada dua tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya kan Klebun itu baru diangkat jadi masih harus memahami mereka terlebih dahulu apalagi Klebun yang berada di radius sulit karena biasanya mereka masih terpaku pada peraturan lama yaitu harus ada pemberitahuan ke Kelurahan kalau mau berperkara. Padahal kalau yang diberi relass itu tergugat

⁵³ Bapak Hosen, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

atau termohon kan tidak perlu memberi tahu Kelurahan, terlebih kalau nanti perkaranya diprediksi verstek karena pihak tergugat atau termohon itu memang tidak diketahui keadaan terbarunya.”⁵⁴

Upaya Pengadilan dalam menganggapi Klebun yang tidak mau mengantarkan relass panggilan kepada pihak sebenarnya sudah diusahakan. Pihak Pengadilan Agama Bangkalan sudah berupaya membantu masyarakat agar bisa melaksanakan proses berperkara secara gratis dengan cara berperkara secara prodeo. Bahkan semenjak tahun 2013 dana untuk perkara prodeo sudah ditambah, yaitu yang awalnya berkisarhanya 60 juta, setelah tahun 2013 bertambah menjadi 70 juta. Selain itu, untuk menghindari masyarakat yang akan dibantu Klebun, pihak masyarakat sudah tidak lagi diwajibkan meminta surat keterangan tidak mampu kepada Balai Desa melainkan cukup dengan hanya menfoto copy surat atau kartu keterangan bahwa masyarakat tersebut tergolong tidak mampu seperti kartu ASKIN. Hal ini bertujuan selain untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.

Dalam porsinya sebagai Klebun, seharusnya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan seperti yang dipaparkan diatas. Selain bukan merupakan tupoksi dari Klebun sebagaimana dalam Tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di bab IV paragraf kedua, juga bisa dikategorikan kegiatan korupsi sehingga Klebun yang menarik biaya secara illegal tersebut dapat terjerat Pasal dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Selain itu, faktor tidak adanya lembaga bantuan hokum di Pengadilan Bangkalan menjadikan

⁵⁴ Ibu Utik Inayatin, wawancara (Bangkalan, 4 Maret 2015)

masyarakat merasa bingung ketika akan berperkara ke Pengadilan sehingga secara tidak langsung membutuhkan *Klebun* sebagai orang yang dipercaya di Desanya untuk membantu. Jadi tidaklah heran jika masyarakat sampai saat ini tidak melaporkan *Klebun* kepada pihak yang berwajib karena rasa hormat mereka kepada figure *rato* (pemimpin). Terlebih lagi, karisma seorang *Klebun* dalam suatu Desa sangatlah berpengaruh terhadap masyarakatnya, mengingat Masyarakat yang sangat bergantung kepada *Klebun* pada dasarnya memiliki alasan. Karena dalam konteks ini, tidak sembarang orang dapat mencalonkan diri sebagai *klebun*. Mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai *klebun*, selain harus memenuhi prosedur normatif administratif seperti harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), juga harus memiliki persyaratan kultural. *Klebun* merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura. *Klebun* oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai broker budaya di samping kyai dan blater oleh karena kedudukannya yang sangat berpengaruh dan kuat tersebut. Terkadang di beberapa desa *klebun* menjadi lebih kuat dari blater dan kyai karena yang menjadi *klebun* merupakan blater itu sendiri bahkan kyai juga. Tentunya dengan kekuatan keblaterannya dan kekeayaannya yang kemudian ditambah dengan kekuasaan formal di sebuah desa maka kekuatannya pun menjadi sangat tidak diragukan. *Klebun* merupakan elit desa yang dalam mencapainya tidak sembarang orang bisa. Karena itu untuk meraih kedudukan sebagai *klebun* ada persyaratan kultural di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana kepala desa pada umumnya. Di antara persyaratan kultural itu antara lain bahwa *klebun* harus memiliki kekuatan personal, baik dalam konteks keilmuan atau dalam arti yang

lain yaitu memiliki kapasitas diri sebagai seorang jagoan atau memiliki jiwa keblateran. Persyaratan kultural lainnya adalah ikatan kekerabatan menjadi faktor kultural yang sangat dominan. Bahkan, tidak jarang yang terjadi dalam pemilihan klebun adalah pertarungan rezim keluarga. Selain itu ikatan dan jaringan keblateran menjadi mutlak diperlukan dalam upaya menjadi klebun. Selain itu, syarat kultural lainnya adalah mereka harus mempunyai kemampuan personal seperti mempunyai jiwa keblateran yang dipersepsikan sebagai jiwa orang yang pemberani, yaitu keberanian memimpin dan keberanian bertanggung jawab terhadap segala urusan rakyatnya. Selain itu, ikatan kekerabatan menjadi penentu utama dalam pemilihan klebun. Bahkan pemilihan klebun tampak sekali sebagai arena pertarungan rezim keluarga. Kekayaan dan jaringan menjadi syarat kultural berikutnya, termasuk dalam hal ini jaringan keblateran. Banyaknya tamu yang datang ke rumah calon, selain dipandang sebagai keluasan pergaulan juga sebagai pesan tersendiri bagi lawan agar tidak meremehkan dan merendahkan. Faktor tersebut juga menjadikan *Klebun* sangat dipercaya oleh masyarakatnya.